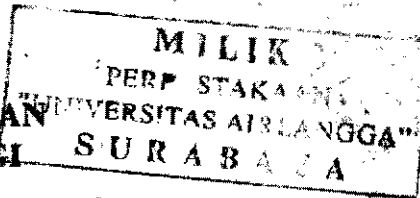


DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA



LAPORAN PENELITIAN

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA HUTANG-PIUTANG DAN WARISAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS I JAWA-TIMUR

M. KOBIRAN ASHARI, S.H.
FAKULTAS HUKUM UNAIR
SURABAYA



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Tahun : 1978/1979

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA
HUTANG-PIUTANG DAN WARISAN DI
PENGADILAN NEGERI KELAS I
JAWA - TIMUR

Oleh

M. KOBIRAN ASHARI, S.H.
FAKULTAS HUKUM

LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A

1 9 7 9

KATA PENGANTAR.

Sejak diselenggarakan Proyek Pengembangan Kader Peneliti oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dengan surat penugasan Dekan nomor II.UP/495/Fhk/13/77 sebagai peserta proyek tersebut, yang berlangsung dari bulan Pebruari 1977 sampai dengan bulan Juli 1977, mulailah timbul rangsangan untuk mencoba melaksanakan penelitian khususnya bagi para peserta proyek tersebut.

Pada penataran tersebut para anggota banyak memperoleh pengetahuan dalam bidang penelitian baik teori maupun praktek. Dari pengalaman inilah kami mencoba untuk melaksanakan secara kongkrit gagasan yang pernah terungkap pada penataran tersebut.

Salah satu hal yang sering dirisaukan oleh masyarakat mengenai Sistem Hukum di Indonesia ialah masalah " waktu " penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri khususnya mengenai perkara Perdata terutama perkara warisan dan hutang piutang.

Sementara orang berprasangka bahwa jika berperkara mengenai warisan dan hutang piutang ke Pengadilan Negeri pasti tidak diperoleh keseimbangan antara nilai barang yang diperkarakan dengan hasil yang diharapkan oleh pihak-pihak yang berperkara, karena waktu penyelesaian yang berlarut-larut sehingga mengakibatkan munculnya biaya perkara yang tidak-

seimbang.

Pada lain pihak terjadi *contradictie*, yakni menurut pasal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menghendaki penyelesaian setiap perkara dengan cara yang sederhana, ringan dan cepat.

Atas dasar *contradictie* inilah kami ingin mencoba untuk meneliti jangka waktu penyelesaian perkara hutang piutang dan warisan, yang sekaligus kami berharap untuk mengetahui apa sebab musababnya.

Setelah penelitian dilaksanakan bersama anggota team peneliti, ternyata banyak sekali memperoleh bantuan baik dari instansi Pengadilan maupun instansi Pemerintah daerah di wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Oleh karena itu kami bersama-sama dengan anggota team peneliti tidak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan sepe-nuhnya untuk kelancaran dan berhasilnya pelaksanaan penelitian ini kepada bapak :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur.
3. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
4. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro.
5. Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan.
6. Ketua Pengadilan Negeri Madiun.

7. Ketua Pengadilan Negeri Kediri.
8. Ketua Pengadilan Negeri Malang.
9. Ketua Pengadilan Negeri Jember.

Kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas untuk kesuksesan penelitian ini tidak lupa kami sampaikan terima kasih.

Sebagai langkah pertama tentunya banyak kekurangan-kekurangan, ibarat pepatah mengatakan " Tiada gading yang tidak retak ".

Untuk itu tegur-sapa yang obyektif dan membangun dari semua pihak akan kami terima dengan penuh keterbukaan.

Demikianlah, semoga laporan penelitian ini mendapat - ridlo dan rahmat Tuhan Yang Kuasa, serta bermanfaat bagi pembinaan dan pembaharuan hukum dewasa ini.

Surabaya, Akhir Desember 1979.

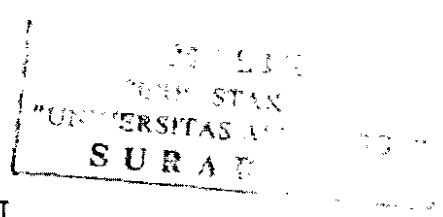
Proyek Penelitian Fakultas Hukum UNAIR

K e t u a ,

ttd.

M. Kobiran Ashari, S.H.

NIP 130445325



SUSUNAN TENAGA PENELITI

PEMBIMBING

Soetandyo Wignjosoebroto, M.P.A.

K E T U A

M. Kobiran, S.H.

PENGUMPULAN DATA

D O S E N

1. Afdol, S.H.
2. Moch. Isnaeni, S.H.
3. Drs. T. Soedjadino.
4. Moch. Achwan, S.H.
5. Sri Hajati, S.H.
6. M. Kobiran, S.H.
7. Machsun Ali, S.H.

MAHASISWA

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Lukman Hakim Soetrisno | Np.7165 |
| 2. Nurdjaja | Np.7541 |
| 3. Ach. Soehaimi | Np.7098 |
| 4. Abdoel Chamid Rochim | Np.5100 |
| 5. S. Poedji Prajitno | Np.7115 |
| 6. Soeharjanto | Np.7129 |
| 7. Supratanan R. | Np.037620266 |

PENGOLAHAN DATA/PENYUSUNAN LAPORAN

1. Afdol, S.H.
2. Moch. Isnaeni, S.H.
3. Sri Hajati, S.H.
4. Moch. Achwan, S.H.
5. M. Kobiran, S.H.

PENDAHULUAN.

Kemanusiaan menuntut supaya dalam pembangunan dan dalam pelaksanaan pembangunan manusia diperlakukan sebagai manusia. Betapapun miskin dan hina masih mempunyai keluhuran manusia (dignity of man), yang diakui oleh peraturan-peraturan, hak-hak azasi, Undang-undang Dasar dan hukum kita. Kemanusiaan di Indonesia dijamin oleh Sila Ke II dari pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Manusia untuk melangsungkan kehidupan bersamanya senantiasa berdaya-upaya dalam suasana aman dan damai, dimana untuk kepentingan tersebut kiranya tidak terlepas dari masalah-masalah bagaimana bentuk keadilan yang disepakati oleh warga masyarakatnya.

Tentu saja bentuk keadilan tersebut yang berlaku umum, obyektif dan tidak mempertimbangkan subjek dan situasi subjek.

Untuk menciptakan keadilan tersebut akhirnya manusia dalam perkembangan peradabannya sampai pada pembentukan badan peradilan yang terpisah dari badan pemerintah.

Badan peradilan sebagai suatu sistim hukum terpisah dari Badan Legislatif dan Badan Executief sebagai suatu sistim politik, walaupun pemisahan ini disetiap negara berkembang berbeda satu dengan yang lainnya.

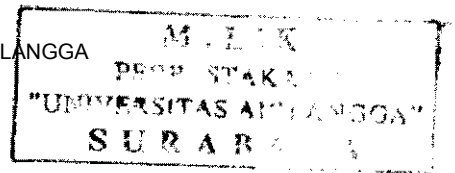
Dari pemisahan inilah tampak perkembangan kehidupan masyarakat kearah negara yang demokratis.

Badan legislatip sebagai salah satu kontestan dari sistim politik suatu negara demokrasi memberi in-put berupa hukum in-abstracto pada badan pengadilan dan dalam sistim sosial yang di dalamnya terdapat " value conflict " memberikan in-put berupa gugatan-gugatan kepada sistim hukum.

Hakim dalam menerapkan undang-undang in-abstracto, ia harus memecahkan bagaimana menurut hukumnya bagi tiap-tiap masalah yang diajukan untuk dimintakan pendapatnya (oor- deelnya). Tegasnya ia harus memutuskan apa yang harus berlaku berdasarkan ketentuan hukum yang ada, terhadap soal - yang bersangkutan.

Mengingat undang-undang sebagai hasil badan legisla- tif, kenyataannya dimana-mana sering sulit mengikuti perkembangan masyarakat secara adekwat dan tidak mampu menga- tur suatu masalah secara tuntas dan menyeluruh.

Prof. Mr. Paul Scholten juga mengatakan bahwa tugas - hakim menemukan hukumnya (rechtsvinding), adalah lebih da- ri pada hanya menempatkan tiap-tiap persoalan di bawah Un- dang-undang yang bersangkutan, juga lebih dari pada hanya- menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada terhadap ke- jadian yang telah dianggap pasti.



Lebih-lebih dinegara kita, yang disamping hukum yang tertulis, masih berlaku hukum yang tidak tertulis.

Hakim dalam menyelesaikan perkara tentang hutang-piutang-atau warisan tentunya sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 27 ayat 2 Undang Undang No. 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman Bab IV, tentang hakim dan kewajibannya, dinyatakan bahwa hakim,sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikut i dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Apalagi negara kita yang sekarang sedang menghadapi-pembangunan disegala bidang termasuk didalamnya dibidang-hukum.

Di dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 mengenai G.B.H.N, pada BAB IV sub D bidang Hukum diantaranya dinyatakan bahwa :

Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan.

Untuk itu perlu ditingkatkan usaha menertibkan badan badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang-masing-masing serta meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum

Selain dari hal tersebut perlu juga ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Masalah tersebut diatas memang perlu ditingkatkan terutama karena sebagian besar rakyat Indonesia bertempat di desa-desa, yang pada umumnya buta akan hukum, harus mendapat keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaannya.

Sebab sering dalam surat kabar dimuat adanya sengketa sengketa tentang jual-beli tanah, yang mana rakyat didesa-desa sebagai pemilik tanah sering menjadi korban.

Jadi hakim sebagai salah satu penegak hukum tidak lagi bersifat pasif, atau seperti apa yang dikatakan oleh Montesquieu di Perancis yang pernah terjadi, bahwa hakim tidak lagi sebagai corongnya undang-undang lagi, tetapi betul-betul dalam pelaksanaan undang-undang "rechtsvinding" sebagai proses yang bersifat otomatis.

Sekarang yang menjadi masalah, ialah bagaimana mengusahakan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan murah seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Proses peradilan yang cepat hanya dapat diukur dengan waktu, dan tidak perlu dikaitkan dengan kesatuan waktu yang tertentu, misalnya bulan dan tahun. Sebab cepat dan lambat nya suatu proses peradilan dapat dipengaruhi oleh keadaan-tiap-tiap perkara itu sendiri. Keadaan suatu perkara termasuk mereka yang berkepentingan didalamnya dapat mempengaruhi

hi cepat dan lambatnya proses perkara itu sendiri.

Akan tetapi faktor yang utama yang menentukan yang dapat menyebabkan cepat atau lambatnya suatu perkara bukanlah dari mereka yang involved didalamnya, melainkan dapat juga ditentukan oleh hukum acara itu sendiri.

Mereka yang involved dalam suatu perkara hanyalah merupakan faktor pelaksana saja, yang dalam menjalankan perannya telah ditentukan oleh suatu aturan tertentu dan tidak boleh menyimpang dari aturan yang telah ditentukan. Dan apabila terjadi penyimpangan akan dapat dikenakan sanksi tertentu.

Bila kemudian terjadi penguluran waktu yang menyebabkan proses menjadi lambat dan berlangsung sampai bertahun-tahun sepanjang tidak ada peraturan yang melarangnya, hal ini bukanlah kesalahan dari pihak mereka yang involved, melainkan dari kurang sempurnanya aturan hukum acaranya.

Mohammad Isnaeni dalam uraiannya : menyatakan " tentang cepat tidaknya suatu perkara dapat diselesaikan, bergantung pada banyak faktor, baik yang ada di dalam, maupun yang ada di luar tubuh pengadilan.

Salah satu faktor yang terletak di dalam tubuh pengadilan sendiri, dapat kami sebutkan masalah formasi, tegasnya jumlah tenaga hakim, satu dan lain, berhubungan dengan ketentuan yang tersebut pada pasal 15 yang mensyaratkan bahwa pemeriksaan suatu perkara dilakukan oleh sebuah majelis yang -

terdiri sekurang-kurangnya dari tiga orang hakim". Hambatan yang berasal dari luar pengadilan seperti sudah menjadi kebiasaan, jika pengadilan menunda persidangan untuk seminggu, maka spontan kuasa dari pihak yang diberi beban (menjawab atau membuktikan) berkeberatan dan minta dua minggu, dengan alasan, bahwa seminggu yang akan datang ia harus membela di lain tempat, dan seterusnya".

Jadi apa yang dikehendaki pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pokok pokok Kekuasaan Kehakiman, hingga kini belum sepenuhnya tercapai.

Penyelesaian yang cepat terhadap suatu conflict adalah suatu sarana yang ideal untuk memenuhi keinginan masyarakat, karena penyelesaian sengketa yang cepat dengan sendirinya akan membawa biaya yang ringan.

Adanya suatu pola yang sederhana merupakan sarana untuk mempercepat penyelesaian suatu sengketa. Yang jelas dalam hal ini masih banyak hambatan-hambatan yang perlu ditanggulangi, karena menurut kenyataan, kita menghadapi berbagai tantangan, yang sebagian terdiri dari hambatan-hambatan yang belum dapat ditanggulangi seluruhnya, dan sebagian lagi berupa problema-problema baru.

Hambatan-hambatan tersebut dapat diperinci dalam hal-hal yang menyangkut perundang-undangan, aparat penegak hukum, mekanisme penegak hukum dan masyarakat.

Yang penting diantaranya adalah hal-hal sebagai berikut :

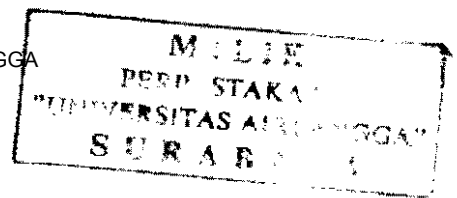
- a. Penanggulangan perkara masih lambat, kurang tegas, cepat, sehingga daya preventipnya tidak menurut apa yang dicita-citakan, dan kurang dapat memupuk kepercayaan rakyat pada hukum.
- b. Masyarakat yang masih belum tumbuh kesadaran hukumnya sesuai dengan apa yang dicita-citakan.
- c. Mekanisme administrasi peradilan yang masih belum-tepat dapat ditertibkan, khususnya dalam bidang penyelesaian perkara.

Dengan demikian penyelesaian perkara yang memerlukan waktu yang relatip lama, disamping membawa efek yang negatif bagi para pihak, juga berakibat kepada mereka untuk mencari penyelesaian di luar Pengadilan Negeri.

Hipotesa-hipotesa

Atas dasar latar belakang yang kami uraikan di atas timbul beberapa asumsi antara lain :

1. Penyelesaian perkara-perkara perdata yang ditangani pengadilan Negeri relatip memerlukan waktu cukup lama.
2. Adanya kaitan jumlah perkara yang masuk dengan personalia yang ada.

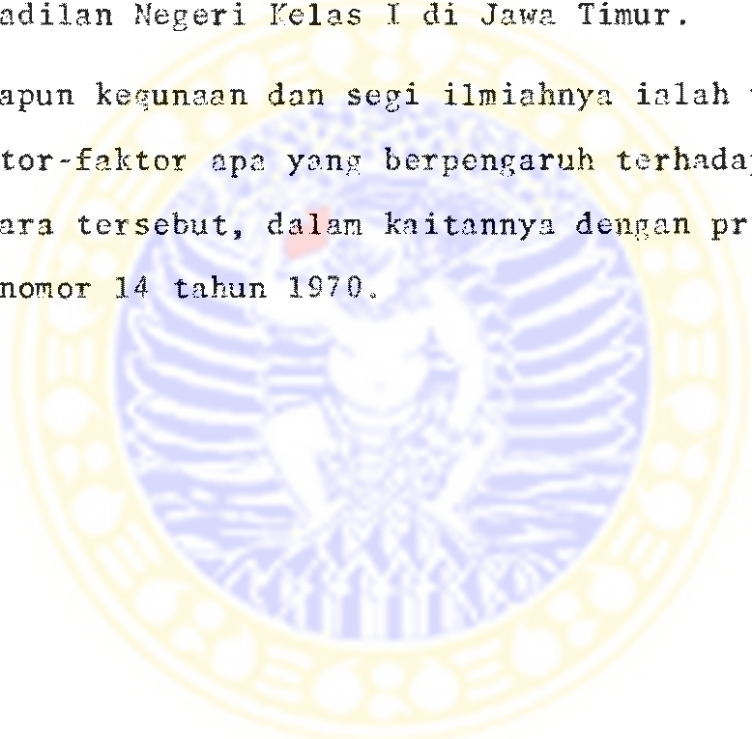


3. Terbatasnya jumlah hakim yang menangani perkara per data.
4. Adanya tugas-tugas sampingan dari pada hakim.

Tujuan dan kegunaan penelitian :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jangka waktu rata-rata penyelesaian perkara hutang piutang dan warisan - di Pengadilan Negeri Kelas I di Jawa Timur.

Adapun kegunaan dan segi ilmiahnya ialah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap penyelesaian perkara tersebut, dalam kaitannya dengan prinsip undang-undang nomor 14 tahun 1970.



PROSEDURE PENELITIAN

Dalam uraian bab sebelumnya kita ketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan lembaga - peradilan. Mengenai hal ini sebenarnya telah ada tiga prinsip yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengadilan, yaitu: pengadilan harus memberi pelayanan secara cepat, murah dan sederhana. Ketiga prinsip tersebut jelas dinyatakan pada - pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman nomor 14/1970.

Penelitian kali ini tidak bermaksud untuk mengetahui pelayanan lembaga peradilan dari ketiga aspek itu. Sebagai langkah pertama, penelitian ini hanya memfokuskan perhatian pada prinsip yang pertama, yaitu pengadilan harus memberikan pelayanan penyelesaian perkara secara cepat. Dengan demikian problem pertama adalah apakah lembaga-lembaga peradilan mampu memberikan servis yang berupa penyelesaian - perkara secara cepat atau tidak. Masalah kedua adalah faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap jangka waktu penyelesaian perkara tersebut.

Untuk mendapatkan informasi empirik tentang masalah - pertama, dilakukan studi dokumen yang berupa putusan-putusan pengadilan. Pada garis besarnya putusan-putusan pengadilan dibedakan kedalam dua golongan yaitu putusan-putusan

perkara pidana dan putusan-putusan perkara perdata. Kalau kita menyoroti dari sudut pelayanan lembaga-lembaga peradilan, kiranya penelitian ini kurang tepat kalau mempelajari putusan-putusan perkara pidana. Dalam perkara-perkara yang termasuk golongan ini, salah satu pihak tidak sepenuhnya bebas -- bahkan hampir-hampir tidak dapat mengelak kemauan pihak lain (penuntut umum) -- untuk menentukan lokus penyelesaian sengketa. Oleh karena itu dari perkara perkara pidana tidak nampak adanya keinginan masing-masing pihak untuk minta pelayanan sebagaimana mestinya -- dari lembaga peradilan negara.

Berbeda halnya dengan pada perkara-perkara perdata. Di sini kedua belah pihak sebenarnya bebas memilih ke lembaga-lembaga mana persengketaan mereka ingin diselesaikan. Dengan demikian untuk mempelajari pelayanan lembaga peradilan, cukup dipandang valid jika kita kaji dari berkas-berkas putusan perkara perdata. Dalam golongan perkara perdata masih terdapat beberapa jenis lagi. Di antara jenis-jenis perkara perdata yang sering maju ke pengadilan adalah perkara warisan dan hutang piutang. Atas dasar pertimbangan seringnya kedua jenis perkara ini tampil ke pengadilan, maka penelitian ini tidak lagi menitik beratkan perhatian pada seluruh perkara-perdata, tetapi lebih mengkhusus pada perkara-perkara perdata jenis warisan dan hutang piutang.

Dengan mengetahui cepat tidaknya penyelesaian perkara warisan dan hutang piutang, paling tidak bisa diperoleh gambaran bahwa proses penyelesaian perkara-perkara perdata lainnya akan tidak jauh berbeda dari kedua jenis perkara perdata yang dipelajari melalui penelitian ini.

Masalah ke dua yang berupa faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap jangka waktu penyelesaian perkara, didekati melalui dua macam teknik koleksi data, yaitu studi dokumen dan interview. Kalau pada pokok permasalahan pertama, penggunaan studi dokumen dimaksudkan untuk mengetahui rata-rata tenggang waktu antara tanggal masuk surat gugatan sampai tanggal putusan, maka pada permasalahan ke dua, studi dokumen dimanfaatkan untuk menggali informasi -- dari berkas perkara -- tentang : jenis perkara, ada tidaknya pengacara, frekwensi sidang, frekwensi penundaan sidang beserta pihak yang menyebabkan terjadinya penundaan itu, beban tugas hakim, dan saksi-saksi.

Selain penyempitan masalah dengan penunjukan dua jenis perkara tadi, penelitian ini juga membatasi pengumpulan data hanya pada tahun-tahun tertentu saja. Untuk penelitian semacam ini paling tidak perlu data selama lima tahun, agar jika ingin mengetahui gambaran perkembangan variabel tertentu akan mudah melihatnya. Selain pertimbangan itu, dari sudut kemungkinan pelaksanaan pencarian data, tidak luput pula dari perhatian peneliti.

Oleh karena itu kemudian untuk penelitian ini ditentukan pengambilan data dari putusan-putusan pengadilan pada tahun 1974 - 1978.

Pada awal mulanya penelitian ini bermaksud mengetahui jangka waktu penyelesaian perkara di pengadilan-pengadilan negeri Jawa Timur. Tetapi karena terbatasnya biaya yang tersedia kemudian scope penelitian dibataskan pada pengadilan-pengadilan negeri kelas I Jawa Timur.

Dengan demikian ada 7 pengadilan negeri yang dijadikan sasaran penelitian ini :

1. Pengadilan Negeri Surabaya,
2. Pengadilan Negeri Malang,
3. Pengadilan Negeri Kediri,
4. Pengadilan Negeri Madiun,
5. Pengadilan Negeri Jember,
6. Pengadilan Negeri Bojonegoro,
7. Pengadilan Negeri Pamekasan.

Dari uraian diatas jelas sudah bahwa populasi penelitian ini adalah perkara-perkara warisan dan hutang-piutang yang telah diputus oleh pengadilan-pengadilan negeri kelas I Jawa Timur, tahun 1974 - 1978.

Penentuan perkara-perkara mana yang dijadikan sample, menurut rencana semula akan diambil melalui teknik random sampling. Pada saat tahap kegiatan koleksi data dilaksanakan baru diketahui bahwa teknik random sampling tidak dapat

diterapkan.

Misalnya di pengadilan negeri Jember, peneliti dihadapkan pada kenyataan tidak mudahnya penerapan teknik random sampling untuk berkas-berkas perkara di pengadilan. Dari 208 perkara warisan dan hutang-piutang yang telah diputus, hanya tersedia 20 bendel berkas perkara saja yang dapat disodorkan oleh pihak pengadilan kepada peneliti. Sedangkan di Pengadilan negeri Malang, dari 233 perkara yang dapat disajikan hanya 46 berkas saja.

Kesimpulan sementara yang dapat ditarik dari pengalaman di pengadilan negeri Jember dan Malang itu adalah bahwa teknik penarikan sample secara random kurang tepat untuk penelitian ini. Sebab seandainya tetap dilakukan cara penarikan sample yang utama itu, sample-sample yang tertarik besar kemungkinan termasuk kedalam berkas-berkas perkara yang tidak dapat dijamah oleh peneliti. Ada beberapa alasan pihak pengadilan untuk tidak menyajikan semua berkas perkara yang diperlukan. Senang atau tidak hal ini harus diterima sebagai suatu kenyataan.

Agaknya di sini letak tapal batas kewenangan peneliti dan pihak pemegang sumber data.

Untuk mengatasi kesulitan penarikan sample yang demikian itu, lalu ditempuh teknik sampling yang lain.

Teknik random sampling yang sedianya akan dilaksanakan untuk penelitian ini diputuskan untuk diganti dengan availability sampling. Penggunaan teknik sampling yang terakhir ini tentu saja disertai penuh kesadaran akan kelemahan-kelemahannya.

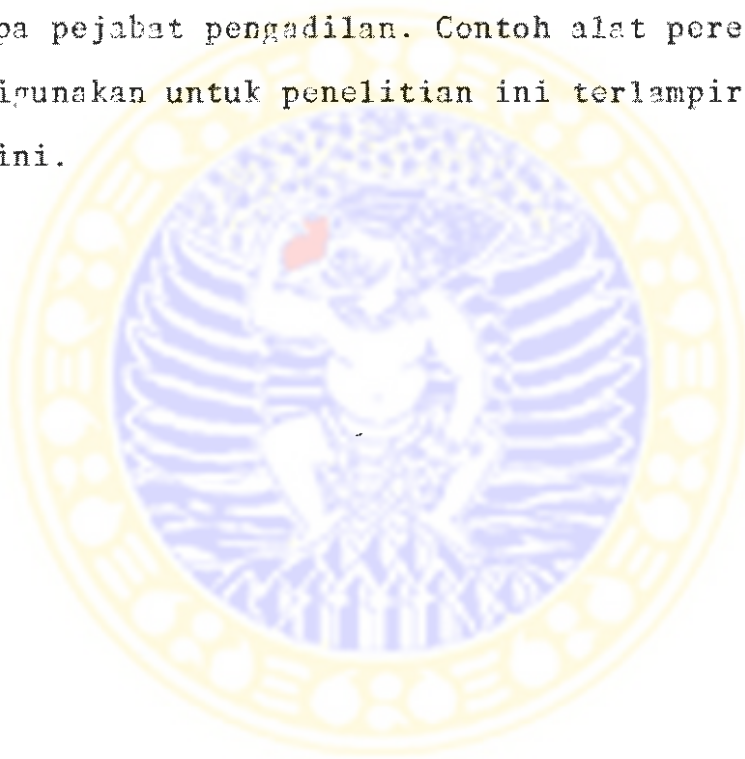
Ada kemungkinan sample yang tertarik tidak akan dapat mewakili ciri-ciri populasi. Karena bisa terjadi sample-sample yang mengandung ciri tertentu justru masih terbenam dalam berkas-berkas perkara yang tidak dapat disediakan bagi peneliti. Adanya error semacam ini tidak dapat tidak harus ditanggung sebagai resiko hasil penelitian ini.

Pelaksanaan koleksi data dilakukan dengan terlebih dahulu mencatat data dari register. Dari buku besar itu kita mendapatkan data tentang jenis perkara, ada tidaknya pengacara, tanggal perkara didaftarkan, dan tanggal putusan. Selebihnya data mengenai frekwensi sidang, pihak yang berhalangan, beban tugas hakim, jumlah saksi dsb. ditelusuri melalui studi berkas perkara yang telah diputus oleh pengadilan.

Untuk jenis data yang pertama, karena sumbernya cukup dari register, maka dengan mudah dapat diperoleh di semua pengadilan. Tetapi data yang tersimpan dalam berkas perkara, sangat sulit diharapkan semua tersedia bagi peneliti. Oleh karena itu dapatlah dimaklumi bila

penelitian ini tidak berhasil menyerap semua data yang ada.

Instrumen yang dipakai merekam data terdiri dari 3 macam daftar isian. Ketiga daftar isian itu cara pengisiannya terutama berpangkal dari sumber dokumen, dan - bilamana diperlukan baru dilengkapi melalui interview - beberapa pejabat pengadilan. Contoh alat perekam data - yang digunakan untuk penelitian ini terlampir dalam laporan ini.



PENEMUAN HASIL PENELITIAN

Jawaban terhadap problema pertama penelitian ini, telah berhasil diketahui, Jangka waktu penyelesaian perkara warisan dan hutang piutang dihitung dari data yang terdapat di dalam setiap putusan. Data tersebut diorganisir dalam suatu tabel silang. Tabel ini berisi data yang dikelompokkan menurut variabel jenis perkara dan jangka waktu penyelesaian perkara.

Pada kolom jenis perkara, dilakukan kategorisasi data, yaitu : data tentang perkara-perkara warisan, hutang-piutang, dan gabungan antara kedua jenis perkara itu. Data yang menggambarkan variabel jangka waktu penyelesaian perkara, dikelompokkan kedalam kolom-kolom yang menandakan tenggang waktu 3 bulan.

Koleksi data dari sumber dokumen putusan-putusan pengadilan negeri kelas I Jawa Timur, tahun 1974 - 1978, telah memperoleh sampel sebanyak 414 perkara. Jumlah perkara yang termasuk dalam kategori perkara warisan sebanyak 180 perkara. Sedangkan jenis perkara yang dikategorikan hutang-piutang berjumlah 234 kasus. Adapun sebaran data yang terjadi dari 2 macam variabel itu akan segera terlihat dalam tabel I berikut ini.

**JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA DIHUBUNGKAN DENGAN JENIS PERKARA
DI PENGADILAN-PENGADILAN NEGERI KELAS I JAWA TIMUR
1974 - 1978.**

n = 414

JENIS PERKARA	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA (dalam bulan)													JUM- LAH
	0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33	33-36	36+	
WARISAN	35	59	40	17	15	8	1	2	-	2	-	-	1	180
HUTANG PIUTANG	50	59	41	34	21	8	10	2	2	-	3	1	3	234
GABUNGAN	85	118	81	51	36	16	11	4	2	2	3	1	4	414

Sumber data : penelitian FII-UNAIR 1979.

Sebaran data dalam tabel I tadi, agaknya belum dapat secara langsung memberikan informasi tentang rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara. Untuk lebih mendaya-gunakan tabel tersebut agar mampu berbicara lebih banyak, penelitian ini memerlukan bantuan ilmu statistika. Dalam menganalisa tabel ini digunakan rumus :
$$\bar{X} = \frac{\sum fx}{n}$$

Setelah angka yang tertera dalam tabel di atas dimasukkan rumus, perhitungan tersebut akhirnya menghasilkan nilai 7,78. Angka ini mempunyai arti bahwa rata-rata penyelesaian perkara warisan dan hutang-piutang di pengadilan-pengadilan negeri kelas I Jawa Timur, tahun 1974 - 1979 adalah 7,78 bulan. Atau tepatnya 7 bulan 23 hari.

Rata-rata penyelesaian perkara yang ternyata membutuhkan waktu hampir 8 bulan itu, dapat mengundang banyak penilaian terhadap lembaga peradilan di negara ini. Apakah jangka waktu tersebut merupakan prestasi yang baik atau kurang baik, tergantung pada alat ukur apa yang bakal di gunakan.

Sebagai suatu ilustrasi, kiranya patut diperhatikan adanya patokan besarnya suku bunga yang sampai kini dapat ditolelir pihak pengadilan yaitu 6% per bulan. Dalam suatu sengketa antara dua belah pihak mengenai hutang-piutang misalnya, pihak Kreditur akan mudah membuat perkiraan mengenai kerugian yang diakibatkan oleh proses penyelesaian sengketa di pengadilan negeri. Keuntungan kreditur sekurang kurangnya dapat dihitung sebesar $8 \times 6\%$ nilai harta

yang disengketakan. Kalau perhitungan demikian benar, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan negeri, pihak kreditur harus sudah memikirkan kemungkinan akan mengalami kehilangan keuntungan hampir 50% dari nilai harta yang disengketakan.

Persepsi warga masyarakat tentang pelayanan pengadilan, kemungkinan sangat berbeda dengan angka yang diperoleh dari tabel I tadi. Walaupun belum pernah diadakan penelitian tentang opini warga masyarakat terhadap pelayanan pengadilan, namun informasi-informasi yang diterima mengantarkan pada asumsi-asumsi bahwa menurut persepsi warga masyarakat, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan akan memakan waktu yang lama.

Belum lagi kalau pelayanan pengadilan itu ditinjau dari segi pembeayaannya. Kesan yang ditarik dari observasi sekilas lintas mengenai hal ini, juga menyatakan bahwa pengadilan yang dicari melalui proses pengadilan hanya dapat diperoleh dengan pembayaran yang mahal.

Data yang diangkat dari hasil penelitian ini memang terbatas pada pengungkapan rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara di pengadilan-pengadilan negeri. Studi tentang opini warga masyarakat terhadap hasil kerja lembaga-lembaga peradilan agaknya belum pernah dilakukan. Namun dugaan-dugaan kuat yang dapat ditarik kenyataan di

beberapa tempat, menunjukkan bahwa warga masyarakat masih menilai perihal berperkara ke pengadilan itu adalah suatu kemewahan.

Akibat dari lama dan mahalanya berperkara itu, orang lalu berfikir panjang lebih dahulu sebelum mengambil putusan untuk memanfaatkan lembaga peradilan negara. Kalau disini keraguan akan efisiensi lembaga peradilan belum di buktikan secara empirik, tidaklah berarti kesimpulan sementara tersebut bersifat lemah.

Di negara maju seperti Amerika telah dilakukan studi yang membuktikan kebenaran asumsi demikian itu. Penelitian Stewart Macauley terhadap para pengusaha di Amerika berhasil mengungkapkan data bahwa para pengusaha di sana kini menilai berperkara lewat pengadilan itu tidak efisien. Mereka enggan memanfaatkan lembaga peradilan yang ada, dan sebagai gantinya mereka lebih suka mencari azas-azas penyelesaian sengketa diluar sidang pengadilan.

Hasil penelitian Macauley ini cukup membesarkan hati karena dengan demikian asumsi-asumsi mengenai kurang efisien kerjanya lembaga peradilan kita telah mendapat dukungan yang meyakinkan. Jika penelitian ini kita gunakan untuk mendiagnose kelemahan-kelemahan yang diidap oleh lembaga peradilan kita, maka terapi yang patut diperhatikan agar lembaga peradilan menjadi sehat (efisien) kembali adalah dengan mempercepat proses penyelesaian perkara yang

diajukan ke sidang pengadilan. Dengan pelayanan yang demikian, kiranya lembaga ini akan lebih berperan secara positif dalam kehidupan sistim sosial di Indonesia.

Sedikit bergeser dari pembicaraan sebagaimana terurai di atas, tabel I juga memaparkan sebaran data menurut jenis perkara. Penghitungan rata-rata jangka waktu proses peradilan sengketa warisan dan hutang piutang dilakukan dengan mengulang cara yang telah dipraktekkan sebelumnya. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya selisih waktu 1 bulan 6 hari. Pada jenis perkara warisan tercatat angka 7 bulan 5 hari dan pada perkara hutang-piutang mencapai 8 bulan 11 hari.

Kian lamanya rata-rata proses peradilan perkara hutang-piutang bila dibandingkan dengan perkara warisan boleh jadi disebabkan adanya unsur kesengajaan dari pihak yang merasa bersalah.

Usaha untuk memperpanjang proses peradilan ini, bisa mendatangkan keuntungan bagi pihak yang sengaja menggunakan taktik mengulur waktu. Gejala yang diperlihatkan oleh jenis perkara yang terakhir ini menggugah kita untuk mengajukan lebih lanjut suatu pertanyaan yang mendasar, yaitu apakah kurang cekatnya pengadilan dalam menyelesaikan perkara perdata itu bersumber pada diri lembaga peradilan ataukah terletak pada pihak-pihak yang berperkara sendiri. Jawaban terhadap dapat diberikan oleh tabel-tabel berikut ini.

TABEL II

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA DIHUBUNGKAN DENGAN BEBAN
TUGAS HAKIM (YANG TIDAK MERANGKAP JABATAN) DI PENGADILAN-
PENGADILAN NEGERI KELAS I JAWA TIMUR TAHUN 1974 - 1979.

RATA-RATA PERKARA YANG DITANGANI HAKIM PER BULAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA (dalam bulan)													JUMLAH
	0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33	33-36	36+	
1 - 5	10	26	21	11	5	3	2	-	3	1	-	-	2	91
6 - 10	20	50	43	25	9	7	3	2	3	-	1	1	4	162
11 - 15	7	32	32	14	14	6	4	-	1	-	-	1	-	111
16 +	4	25	4	5	6	1	3	1	-	-	1	-	2	52

Sumber data : penelitian FH-UNAIR-1979.

Mengenai beban tugas hakim yang diduga ada pengaruhnya terhadap jangka waktu penyelesaian perkara, dapat dibuktikan dari data yang tertera dalam tabel II. Adapun yang dimaksud dengan baban tugas hakim dalam penelitian ini ada dua macam. Pertama berupa tugas-tugas pokok hakim yaitu mengadili sejumlah perkara-perkara yang diserahkan kepadanya. Kedua, berupa tugas-tugas di samping tugas mengadili perkara yang kebanyakan bersifat administratif.

Dalam tabel II dimasukkan dua variabel, yang datanya diklasifikasi silang yaitu menurut jenjang beban tugas hakim (rata-rata perkara yang ditangani hakim per bulan) dan menurut jangka waktu penyelesaian perkara. Klasifikasi beban tugas hakim dibuat dengan susunan yang berinterval 4, sehingga menghasilkan kelompok-kelompok data : 1 - 5 per bulan, 6 - 10, 11 - 15 dan 16 perkara atau lebih.

Melalui perhitungan statistik dapat dibuktikan bahwa hakim yang hanya menangani 1 - 5 perkara per bulan, rata-rata memutus perkara dalam waktu 7 bulan 29 hari. Sedangkan para hakim yang mendapat bagian 16 perkara atau lebih, memerlukan waktu penyelesaian perkara rata-rata 9 bulan 11 hari. Dengan demikian data di atas menunjukkan adanya kecenderungan bahwa jangka waktu penyelesaian perkara ditentukan juga oleh beban tugas hakim. Makin banyak perkara-perkara yang dibebankan kepada hakim akan semakin lama pula penyelesaian sengketa yang dipercayakan kepadanya.

Suatu hal yang tidak terduga sebelumnya bahwa para hakim yang mendapat beban tugas untuk memangku jabatan lain di samping tugas rutin mengadili perkara, ternyata menampilkan hasil yang berbeda dari asumsi yang dirumuskan sebelumnya.

Tabel III berikut ini akan menyajikan data yang dapat membenarkan kesimpulan demikian itu.



TABEL III

**JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA DIHUBUNGKAN DENGAN BEBAN TUGAS HAKIM
(YANG MERANGKAP JABATAN LAIN) DI PENGADILAN-PENGADILAN NEGERI KEBAS I
JAWA TIMUR, TAHUN 1974 - 1979.**

RATA-RATA PERKARA YANG DITANGANI HAKIM PER BULAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA (dalam bulan)													JUM- LAH.
	0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33	33-36	36	
1 - 5	22	36	6	5	7	2	1	2	-	-	-	-	-	81
6 - 10	-	9	8	5	4	1	-	-	2	-	-	-	-	29
11 - 15	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7
16 +	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4

Sumber data : penelitian FH-UNAIR 1979.

kan, namun mereka dapat mengatur secara seimbang volume pekerjaan mereka baik selaku pejabat maupun selaku hakim biasa.

Selain beban tugas mengadili perkara yang frekwensinya dapat mereka atur seimbang dengan kepadatan acara, faktor lain yang mendorong para pejabat pengadilan untuk lebih berprestasi kemungkinan selalu ada. Secara psikologis kiranya dapat diterima sementara pendapat yang menyatakan bahwa orang yang menerima amanat untuk memangku jabatan tertentu, akan berusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya. Sebagai seorang pejabat mereka selalu menjadi perhatian bawahannya. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan akan dapat meneladani perbuatan-perbuatan para hakim anggota lainnya. Pemberian contoh pelayanan proses peradilan yang cepat, nampaknya mereka praktekkan pula, karena pada kenyataannya para hakim yang memegang jabatan tertentu, rata-rata mampu menyelesaikan perkara lebih cepat daripada para hakim yang tidak mempunyai jabatan ganda.

Setelah kita mengamati sistim peradilan dengan pandangan sentral tertuju kepada hakim, komponen selain itu yang banyak berpengaruh dalam proses peradilan adalah peranan pengacara. Secara rasional telah tersebar pendapat -- bagi orang di luar kalangan hukum -- bahwa bila berperkara melalui pengadilan tanpa pengacara, seringkali menemui kesulitan untuk mendapatkan kemenangan. Nampaknya me-

mang dari sisi ini ada korelasi positif antara ada tidaknya jasa-jasa pengacara dan jaminan kemenangan bagi pihak yang dibantu pengacara. Penelitian ini tidak hendak mengupas perihal itu. Kali ini, salah satu komponen sistim peradilan hanya dilihat dari segi efisiensi waktu proses peradilan, jika dihubungkan dengan keterlibatan pengacara dalam perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan.

Untuk mengetahui pengaruh pengacara dalam proses penyelesaian sengketa, dihimpunlah data dari berkas-berkas perkara. Dalam setiap kasus yang kita pelajari bisa diketahui apakah para pihak menggunakan jasa pengacara atau tidak. Di samping itu dapat diperiksa pula waktu yang diperlukan untuk penyelesaian perkara tersebut.

Jangka waktu penyelesaian sengketa dikerjakan dengan menghitung jarak waktu sejak tanggal perkara didaftarkan di pengadilan sampai tanggal keputusan. Data lengkap mengenai dua variabel ini dapat disaksikan dalam tabel IV berikut ini.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA DIHUBUNGKAN DENGAN
ADA TIDAKNYA JASA PENGACARA DI PENGADILAN-PENGADILAN
NEGERI KELAS I JAWA TIMUR, TAHUN 1974 - 1973

	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA (dalam bulan)													JUMLAH
	0 - 3	3 - 6	6 - 9	9 - 12	12-15	15-18	18-21	21-24	24-27	27-30	30-35	35-36	36+	
MENGGUNAKAN JASA PENGACARA	15	41	20	15	4	4	-	2	-	-	-	-	3	104
TANPA MENGGUNA- KAN JASA PENGA- CARA.	44	68	28	13	12	2	1	1	-	1	1	-	-	171

Sumber data : penelitian FH-UNAIR 1979:

Berdasarkan data dalam tabel IV itu, rata-rata jangka waktu proses penyelesaian sengketa pada perkara-perkara yang menggunakan jasa pengacara adalah 7 bulan 19 hari. Sedangkan rata-rata jangka waktu proses penyelesaian sengketa pada perkara-perkara yang tidak menggunakan jasa pengacara adalah 6 bulan 2 hari. Perhitungan tersebut segera memberikan kesan bahwa berperkara dengan menggunakan jasa pengacara akan memakan waktu yang lebih lama daripada berperkara tanpa menggunakan jasa pengacara.

Dugaan demikian bukanlah dibuat secara gegabah, karena angka-angka yang dikemukakan telah d-landasi oleh data yang dicari di alam empiri. Hanya perlu diteliti lebih lanjut apakah ada hubungan kausal antara faktor adanya pengacara dengan lamanya proses penyelesaian perkara. Memang patut diperhatikan adanya anggapan bahwa pengacara dapat mengulur-ulur proses persidangan berdasarkan beberapa keleluasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka.

Tetapi di balik itu menarik pula untuk kita telusuri lebih lanjut mengenai perkara-perkara yang tidak menggunakan jasa pengacara. Di dalam kelompok ini, mungkin dapat kita jumpai beberapa karakteristik tertentu yang menjadikan perkara-perkara ini beruntung mendapat waktu yang lebih cepat daripada proses penyelesaian perkara yang menggunakan jasa pengacara.

Dalam tabel V ini digambarkan mengenai frekwensi penundaan sidang dihubungkan dengan pihak mana yang berhalangan, sehingga memungkinkan sidang ditunda.

Kolom pengelompokkan penundaan sidang dimulai dengan penundaan 1 - 2 kali sampai dengan 36 kali ke atas.

Adapun pihak-pihak yang berhalangan yang menyebabkan sidang ditunda dibagi dalam kolom-kolom :

1. Kolom hakim yang berhalangan
2. " pengacara yang berhalangan.
3. " pihak-pihak yang berperkara berhalangan
4. " persetujuan kedua belah pihak yang berperkara
5. " lain.

Dari 414 berkas perkara yang telah dikumpulkan dari 7 Pengadilan Negeri terlihat adanya 1190 kali penundaan sidang.

Kalau kita lihat angka-angka dalam tabel, maka tidaklah benar anggapan masyarakat, bahwa lamanya proses perkara di Pengadilan adalah karena seringkali sidang ditunda dan penundaan tersebut adalah akibat dari hakim yang berhalangan.

Pada tabel untuk kolom hakim menunjukkan angka relatif kecil yaitu 87 kali atau 7,3% dari 1190 penundaan, dibandingkan dengan kolom-kolom yang lain.

Berdasarkan data yang ada penundaan sidang oleh hakim biasanya disebabkan karena hakim harus melaksanakan tugas lain yang waktunya bersamaan dengan waktu sidang.

TABEL V
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
n = 414

PIHAK YANG BERHALANGAN	FREKWENSI PENUNDAAN SIDANG									JUMLAH
	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 10	11 - 12	13 - 14	15 - 16	16+	
Hakim	4= 0,3%	3 = 0,5%	9 = 0,8%	12 = 1%	12 = 1%	4 = 0,3%	9 = 0,8%	7 =0,5%	27=2,3%	87= 7,3%
Pengacara	1=0,08%	2= 0,2%	1=0,08%	3 = 0,3%	8 =	4=0,3%	5 = 0,4%	2 -0,2%	12=1%	38=3,2%
Pihak-pihak	15=1,3%	25=2,1%	32= 2,7%	30=2,5%	34=2,9%	34= 2,9%	35= 2,9%	5 =0,4%	51=4,3%	261=22%
Persetujuan	13=1,1%	43= 3,6%	22= 1,8%	43= 4%	48= 4%	52= 4,4%	35= 2,9%	9= 0,8%	66=5,5%	336=28,2%
Lain-lain	11= 0,9%	43= 3,6%	62= 5,2%	67=5,6%	55= 4,6%	63=5,3%	43=3,6%	23=1,9%	101=8,5%	468=39,3%
Jumlah	44=3,6%	116=9,7%	126=10,6%	160=13,4%	157=13,2%	157=13,2%	127=10,7%	46=3,9%	257=21,6%	1190=100%

Tugas lain di sini adalah hakim disamping tugas pokoknya sebagai hakim juga dibebani tugas administratif lain.

Misalnya : - Ketua Pengadilan

- Anggota Muspida
- Ketua Korpri
- Hakim kasus pemilu
- Ketua olah raga
- Ketua koperasi

Dan masih banyak lagi tugas-tugas administratif yang bisa dibebankan pada seorang hakim.

Oleh karena tugas-tugas lain inilah sehingga terpaksa hakim menunda sidang.

Selain karena tugas-tugas di atas, beberapa berkas perkara mengatakan bahwa penundaan sidang oleh hakim karena hari sudah siang.

Dengan demikian ditundanya suatu sidang oleh hakim, karena hakim pada waktu yang bersamaan harus melaksanakan tugas administratif lain yang tidak mungkin ditinggalkan.

Pada kolom ini yang menunjukkan angka tertinggi adalah pada penundaan sidang 16 kali ke atas yaitu sebanyak 27 kali atau 2,3%.

Apabila kolom hakim kita bandingkan dengan kolom pengacara dan pihak-pihak yang berperkara, maka dengan menyumlahkan kedua kolom tersebut mendapatkan angka 229 kali atau 25,2% dari 1190 kali penundaan sidang.

Kalau kita lihat tabel, maka angka tertinggi pada kedua kolom tersebut berkisar pada penundaan sidang 16 kali ke

atas sebesar 63 kali atau 5,3%.

Jadi jelas di sini penundaan sidang oleh pengacara dan pihak-pihak jauh lebih sering dibandingkan dengan hakim yang menunda persidangan.

Dalam uraian ini antara kolom pihak-pihak dan pengacara digabungkan, karena pengacara dalam persidangan adalah mewakili pihak-pihak. Dengan demikian ketidak hadirannya seorang pengacara dalam sidang bisa juga diartikan ketidak hadirannya pihak-pihak.

Jadi dalam hal seorang pengacara menunda sidang sama dengan pihak-pihak yang menunda sidang. Hal ini terjadi apabila suatu perkara ditangani oleh pengacara.

Yang dapat dimasukkan dalam kolom ini misalnya :

salah satu pihak sakit, sehingga tidak mungkin datang.

Atau bisa juga apabila suatu perkara ditangani pengacara, ketidak hadirannya si pengacara karena kebetulan harus menghadiri sidang di Pengadilan yang lain.

Selanjutnya kita lihat pada kolom lain, di sini terlihat bahwa kolom ini menunjukkan angka yang tertinggi yaitu 468 kali atau 39,3%. Jadi dari 1190 kali penundaan sidang terdapat 468 kali penundaan yang masuk dalam kolom lain ini.

Dalam kolom lain-lain ini yang dapat dimasukkan diantaranya :

1. Para pihak ingin mengajukan alat-alat bukti lain untuk memperkuat keterangannya.
2. Bisa juga karena saksi-saksi tidak datang atau belum datang. Hal ini bisa disebabkan karena saksi sakit, sehingga tidak dimungkinkan datang, atau karena saksi bertempat tinggal di luar kota, sehingga memerlukan waktu yang agak lama untuk mendatangkannya.

Jelasnya yang dimasukkan dalam kolom ini adalah alasan apa saja yang tidak bisa dimasukkan dalam kolom hakim, pengadilan, pihak-pihak maupun persetujuan.

Angka tertinggi pada kolom ini berkisar pada penundaan sidang 16 kali ke atas yaitu sebanyak 101 kali atau 8,5%.

Kolom lain yang juga terlihat menunjukkan angka yang tinggi adalah kolom persetujuan. Pada kolom ini terdapat 336 kali penundaan atau 28,2%. Jadi dari 1190 kali penundaan, 336 kali adalah karena persetujuan kedua belah pihak. Dapat dimasukkan dalam kolom ini misalnya : Pihak tergugat ataupun penggugat belum siap dengan jawaban tertulis. Berdasarkan hal ini maka atas persetujuan kedua belah pihak sidang ditunda untuk memberi kesempatan pada pihak yang akan menyusun jawabannya secara tertulis.

Pada kolom ini angka tertinggi berkisar pada kolom penundaan sidang 10 -12 kali yaitu sebanyak 15 kali atau 4,4%.

KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan penelitian seperti yang terurai dalam bab yang terakhir di atas, sementara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian perkara lewat pengadilan khususnya perkara hutang-piutang dan warisan memakan waktu rata-rata 8 bulan. Persepsi warga masyarakat terhadap pelayanan pengadilan yang demikian menyatakan bahwa proses perkara lewat pengadilan memakan waktu yang lama dan hanya dapat diperoleh dengan pembiayaan yang mahal.
 2. Jangka waktu penyelesaian perkara ternyata ditentukan juga oleh beban tugas hakim. Makin banyak perkara yang dibebankan kepada hakim akan semakin lama pula penyelesaiannya.
 3. Secara empirik dapat dibuktikan bahwa jangka waktu proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa pengacara akan memakan waktu yang lebih lama daripada berperkara tanpa menggunakan jasa pengacara.
 4. Penundaan sidang yang ikut menentukan jangka waktu penyelesaian perkara banyak disebabkan pengacara dan permintaan dari pihak-pihak yang berperkara sendiri.
-

LAMPIRAN

CODE

CONTROL SHEET

Pengadilan Negeri :

Surabaya

Jember

Malang

Bojo-

negoro.

Kediri

Pame-

kasan.

Madiun

Nomor Perkara :

Jenis Perkara :

Warisan

Utang piutang

Majelas Hakim :

Dengan pengacara/tidak

1. _____

2. _____

3. _____

Ya

Tidak

Tanggal perkara di daftar :

Oleh Pengadilan

Tanggal perkara diputus :

--

Nama data kolektor

Nama Editor

Nama card-
pucher.

Tanda tangan

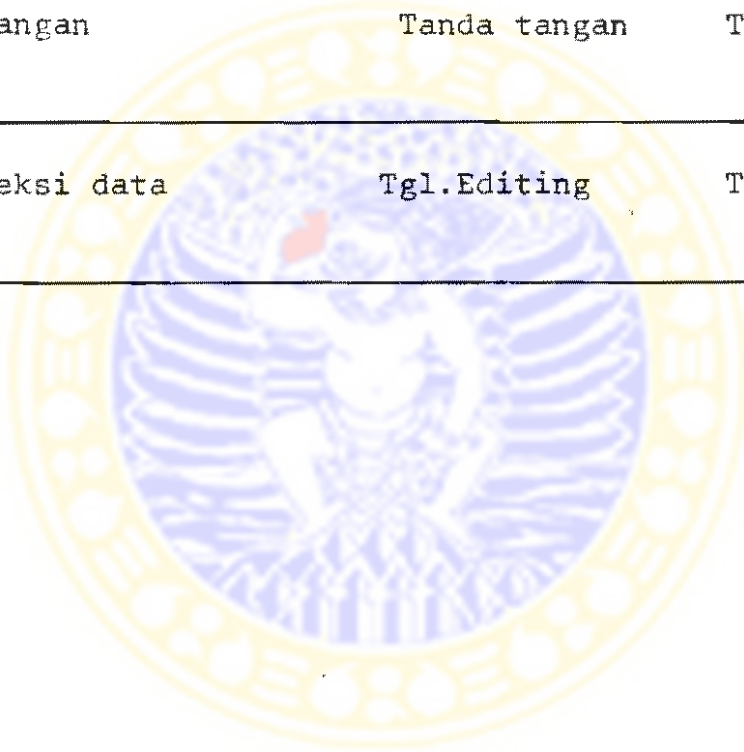
Tanda tangan

Tanda tangan

Tgl.koleksi data

Tgl. Editing

Tgl. Punching



Questionnaire schedule :

1. Berapa kali sidang untuk perkara ini kali
2. Berapa kali sidang ditunda ? kali
- 2.1. Karena Hakim berhalangan kali
- 2.2. Karena Pengacara berhalangan kali
- 2.3. Karena para pihak berhalangan kali
- 2.4. Persetujuan Kedua belah kali
- 2.5. Sebab-sebab lain. kali
3. Berapa rata-rata jumlah perkara yang ditangani oleh Hakim yang mengadili perkara ini ?
(jawaban lihat daftar isian A). perbulan
4. Selama mengadili perkara ini apakah Hakim menjabat pekerjaan lain ?
(Jawaban lihat daftar isian B).
1. tidak
2. ya
- sebagai :
-
5. Berapa jumlah saksi yang diajukan dalam perkara ini ?
- 5.1. Saksi yang bertempat tinggal di dalam kota.
- 5.2. Saksi yang bertempat tinggal di luar kota.

Daftar isian AUntuk perkara : Perdata/Pidana^{*)}

Pengadilan Negeri : _____ Lembar ke : _____

NOMOR	NAMA HAKIM	JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI HAKIM PADA TH:					JUMLAH	RATA-RATA PERBULAN
		1974	1975	1976 -	1977	1978		
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

- *) - Coret yang tidak perlu
 - Tidak termasuk perkara Rol.

Nama pencatat :

Tgl. pencatat :

Daftar isi B

Pengadilan Negeri : _____ Lembar ke: _____

NOMOR	NAMA HAKIM	BEBAN PEKERJAAN LAIN DI SAMPING MENGADILI PERKARA *)				
		1974	1975	1976	1977	1978
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						

*) Tulis jabatan Hakim pada tahun-tahun tersebut.

Nama pencatat : _____

Tgl. pencatat : _____

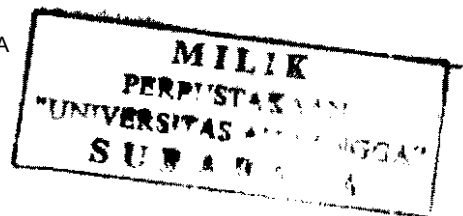
Daftar isian C

Pengadilan Negeri : _____ Lembar ke: _____

NOMOR	J E N I S	JUMLAH PERSONIL DAN FASILITAS PADA TAHUN:					JUMLAH
		1974	1975	1976	1977	1978	
1.	H a k i m						
2.	Panitera dan Panitera pengganti						
3.	Ruang sidang						

Nama pencatat : _____

Tgl.pencatat : _____



DAFTAR KEPUTUSTAKAAN

1. Abdoel Rasjid, S.H. : Proses Peradilan yang sederhana, cepat dan murah.
2. Gaay Fortman, W.F. Prof. Mr. : Rahasia Hukum.
3. Moch. Isnaeni : Hakim dan Undang-undang, Terbitan Ikahi, Cabang Semarang, 1971.
4. Muljana W. Kusumah : Kedudukan Hukum surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.2 tahun 1977.
5. Prasaran Kejaksaan Agung R.I. : Peranan Penegak Hukum dalam pembinaan dan pembaharuan Hukum Nasional disampaikan dalam Seminar.
6. Wiarda, G.I., Mr dan T. Willink Zwolk. : Drie Typen van rechtsvin- ding.

DAFTAR BACAAN LAIN

1. Ketetapan MPR nomer IV/MPR/1978 mengenai G.B.H.N.
2. Undang-undang Dasar 1945.
3. Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
4. Harian Kompas tanggal 17 Maret 1979.

